

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-22/PJ/2009
 TENTANG : PELAKSANAAN PEMBERIAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 DITANGGUNG PEMERINTAH
 ATAS PENGHASILAN PEKERJA
 PADA PEMBERI KERJA YANG
 BERUSAHA PADA KATEGORI
 USAHA TERTENTU

**CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
 ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU**

1. Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:

Penghasilan bruto sebulan		Rp 5.000.000
Pengurangan:		
- Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000)	Rp 250.000	
- Iuran Pensiun	<u>Rp 25.000</u>	
		<u>Rp 275.000</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 4.725.000
Penghasilan neto setahun	12 X Rp.4.725.000	Rp 56.700.000
PTKP setahun:		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000	
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000	
- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000</u>	
		<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 36.900.000
PPh Pasal 21 terutang setahun :	5% x Rp36.900.000	Rp 1.845.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp 1.845.000/12	Rp. 153.750

- b. Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah:

Penghasilan bruto sebulan	Rp 5.000.000
Dikurangi iuran pensiun	Rp (25.000)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang	<u>Rp (153.750)</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 4.821.250

- c. Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah	Rp 4.821.250
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	<u>Rp 153.750</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 4.975.000

2. Danang Resmawan adalah seorang pegawai dari PT Barcelona. PT Barcelona merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Danang Resmawan memperoleh gaji sebesar Rp4.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Selama ini PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh PT Barcelona. Danang Resmawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

a.	Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:		
	Gaji		Rp 4.000.000
	Pengurangan:		
	- Biaya jabatan (5% x Rp 4.000.000)	Rp 200.000	
	- Iuran Pensiun	<u>Rp 25.000</u>	
			<u>Rp 225.000</u>
	Penghasilan Neto sebulan		Rp 3.775.000
	Penghasilan neto setahun	12 X Rp.3.775.000	Rp 45.300.000
	PTKP setahun:		
	- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000	
	- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000	
	- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000</u>	
			<u>Rp 19.800.000</u>
	Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 25.500.000
	PPh Pasal 21 terutang setahun	5% x Rp25.500.000	Rp 1.275.000
	PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp 1.275.000/12	Rp. 106.250
b.	Besarnya penghasilan yang diterima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :		
	Gaji	Rp 4.000.000	
	Dikurangi iuran pensiun	<u>Rp (25.000)</u>	
	Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 3.975.000	
c.	Besarnya penghasilan yang diterima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:		
	Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah	Rp 3.975.000	
	Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	<u>Rp 106.250</u>	
	Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 4.081.250	

Catatan :

Oleh karena selama ini PT Barcelona menanggung PPh Pasal 21 maka PPh yang ditanggung tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

3.	Budi Yanto adalah pegawai tetap di PT Kertas Pulp. PT Kertas Pulp merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri bubur kertas dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 21011. Pada bulan April Tahun 2009, Budi Yanto memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000 dan diberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp30.000. Iuran Pensiun yang dibayar Budi Yanto adalah sebesar Rp25.000 Budi Yanto menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).		
a.	Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009:		
	Gaji sebulan		Rp 2.500.000
	Tunjangan PPh Pasal 21		Rp 30.000
	Penghasilan bruto sebulan		Rp 2.530.000
	Pengurangan:		
	- Biaya jabatan (5% x Rp 2.530.000)	Rp 126.500	
	- Iuran Pensiun	<u>Rp 25.000</u>	
			<u>Rp 151.500</u>
	Penghasilan Neto sebulan		Rp 2.378.500
	Penghasilan neto setahun	12 X Rp.2.378.500	Rp 28.542.000
	PTKP setahun:		
	- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000	
	- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000	
	- tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000</u>	
			<u>Rp 19.800.000</u>
	Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 8.742.000
	PPh Pasal 21 terutang setahun	5% x Rp8.742.000	Rp 437.100
	PPh Pasal 21 terutang sebulan	Rp 437.100/12	Rp. 36.425

b. Besarnya penghasilan yang diterima Budi Yanto apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :

Penghasilan bruto sebulan	Rp 2.530.000
Dikurangi iuran pensiun	Rp (25.000)
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang	<u>Rp (36.425)</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 2.468.575

c. Besarnya penghasilan yang diterima Budi Yanto apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah	Rp 2.468.575
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	<u>Rp 36.425</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 2.505.000

4. Pada bulan Mei 2009 Budi Yanto selain memperoleh gaji beserta tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000. juga menerima bonus sebesar Rp5.000.000. Karena penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 totalnya telah melebihi Rp5.000.000 (gaji dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000 dan bonus sebesar Rp5.000.000 sehingga total penghasilan sebesar Rp7.530.000) maka seluruh PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. Dengan demikian, Budi Yanto pada bulan Mei 2009 tidak mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

5. Azizah Hasanah pada bulan Juni 2009 bekerja pada PT Perkebunan Hijau sebagai tenaga harian lepas. PT Perkebunan Hijau merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha perkebunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 01115. Ia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp200 000. Azizah Hasanah belum menikah (status TK/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp 200.000
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008)	Rp 150.000
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp 50.000
PPh Pasal 21 terutang sehari 5% X Rp 50.000	Rp 2.500
Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari adalah 6 hari X Rp 2.500	Rp 15.000

b. Besarnya penghasilan yang diterima Azizah Hasanah apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah:

Penghasilan bruto berupa upah harian pada bulan Juni 2009 (6XRp200.000)	Rp 1.200.000
Dikurangi PPh Pasal 21 terutang	<u>Rp 15.000</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 1.185.000

c. Besarnya penghasilan yang diterima Azizah Hasanah apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah	Rp 1.185.000
Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	<u>Rp 15.000</u>
Besarnya penghasilan yang diterima	Rp 1.200.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-22/PJ/2009
 TENTANG : PELAKSANAAN PEMBERIAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 DITANGGUNG PEMERINTAH
 ATAS PENGHASILAN PEKERJA
 PADA PEMBERI KERJA YANG
 BERUSAHA PADA KATEGORI
 USAHA TERTENTU

**FORMULIR
 REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH**

Wajib Pajak pemberi kerja :
 NPWP :
 Masa Pajak :

Jumlah pekerja dengan penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak lebih dari Rp 5 Juta orang
Jumlah penghasilan bruto	Rp
Jumlah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	Rp

Daftar pekerja yang telah menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :

NO.	NAMA PEKERJA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO PER BULAN (Rupiah)	PPh Pasal 21 DTP (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

.....,.....2009

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Wajib Pajak Pemberi kerja
 NPWP:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
 NIP 130605098